

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Skripsi ini akan mengkaji tentang sebab – sebab kemunculan gerakan separatisme dalam mendukung referendum Catalonia tahun 2014 – 2017. Isu gerakan separatisme ini merupakan salah satu isu yang sangat diperbincangkan dalam politik globalisasi dan keamanan dunia. Di beberapa kawasan memunculkan anggapan bahwa bahaya gerakan separatisme suatu negara mrugikan negara yang ditinggalkannya.

Catalonia merupakan salah satu bagian di negara Spanyol yang telah mengalami pergolakan nasionalisme. Semenjak tahun 2014 – 2017, Catalonia berusaha melepaskan diri dari bagian negara Spanyol.



(sumber: [google.com/peta.catalonia](http://google.com/peta.catalonia))

Dalam permasalahan ini, masyarakat Catalonia merasa tersisihkan karena kurang dihargai oleh Spanyol. Masyarakat diluar negara tersebut menganggap bahwa Catalonia adalah negara yang miskin. Dalam kenyataannya, Catalonia sudah

memperlihatkan pertumbuhan ekonominya yang sangat pesat dan menjadi penghasil devisa terbesar untuk Spanyol.

Dilihat dari berbagai sisi seperti budaya, ekonomi, sejarah yang dirasa sangat berbeda dari Spanyol. Dari sisi sejarah, Catalunya merupakan sebuah wilayah independen dari Semenanjung Iberia (Spanyol dan Portugal) yang memiliki bahasa, peraturan hukum dan tradisi sendiri. Ketika pernikahan Petronilia, Ratu Aragon dengan Ramon Berenguer IV, seorang bangsawan dari Barcelona, membentuk sebuah dinasti yang membuat putranya mewarisi semua wilayah yang ada di daerah Aragon dan Catalonia. Penguasaan wilayah ini berlaku hingga jaman kekuasaan Raja Philip V. Raja-raja kemudian ingin memaksakan bahasa dan hukum Spanyol di Catalonia. Tapi upaya tersebut terhenti karena Spanyol kembali membentuk Generalitat (pemerintah nasional Catalonia). Kemudian, sukses Perang Spanyol diakhiri dengan kekalahan Valencia pada tahun 1707, Catalonia tahun 1714, dan akhirnya kekalahan pulau terakhir pada tahun 1715, dimana kondisi ini menciptakan lahirnya Spanyol era modern. Raja yang berkuasa selanjutnya kemudian memaksakan penggunaan bahasa Spanyol dan peraturan hukum di wilayah tersebut, namun upaya ini ditinggalkan pada tahun 1931 dan mengembalikan sistem Generalitat (pemerintahan nasional Catalan). Jendral Fransisco Franco, kemudian bermaksud untuk menghancurkan separatisme Catalan dan dengan kemenangannya di pertengahan Ebro pada 1938 dirinya mengambil alih wilayah ini. (Montserrat, 2004: 239)

Catalonia merupakan jantung dari industri Spanyol, karena mempunyai kekuatan maritim terbesar, dan unggul dalam perdagangan barang jadi (tekstil) dan berkembang menjadi rumah bagi perusahaan-perusahaan finansial (teknologi dan jasa). Saat Spanyol mengalami krisis ekonomi, suara kemerdekaan Catalonia nyaring. Warga Catalonia menganggap kekayaan Barcelona digunakan oleh wilayah-wilayah Spanyol yang lebih miskin. Karena kontribusi Catalonia untuk Spanyol sangatlah besar. Spanyol menanggapi, bila Catalonia menyuatkan kemerdekaan maka Spanyol

kehilangan 20 persen pemasukannya dan memicu perdebatan tentang pembagian utang negara. (Barrcels, 1996: 20)

Tetapi dalam hal perbedaan, Catalonia tidak hanya merasa berbeda dalam segi politik, sejarah dan ekonominya saja, mereka mengakui bahwa dalam hal selera makan dan sepakbola mereka pun tidak sama. Dalam hal makan, mereka sangat bangga dengan koki mereka seperti, Ferran Adria (Restoran El Bulli), dan lain-lain. Dan dalam sepakbola pun Catalonia juga memiliki idola sendiri yaitu, FC Barcelona sedangkan warga Spanyol mengidolakan Real Madrid. Maka kedua tim sepakbola ini mewakili rasa sentimen nasionalisme yang berbeda antara Catalonia dengan Spanyol. Pertandingan antara dua tim ini disebut El Clasico yang merupakan ajang yang wajib ditonton oleh masyarakat Spanyol dan Catalonia.

Berawal dari Artur Mas beliau adalah Presiden Generalitat Catalonia dari 2010 hingga 2015 dan bertindak sebagai presiden dari September 2015 hingga Januari 2016. Upaya Catalonia merdeka digalang oleh Presiden Catalonia (Arthur Mas) dari Partai Serikat dan Persatuan yang ingin memperoleh kemerdekaan dengan cara legal dan sesuai konstitusi. Upaya hukum ini selalu dihadang oleh pemerintah Spanyol. Karena itu partai Esquerra Republicana de Catalonia (ERC) ingin melakukan cara yang lain, yaitu tetap melakukan referendum yang ditolak oleh Spanyol, menetapkan kemerdekaan secara unilateral, dan mengancam tidak meloloskan undang-undang Partai Serikat dan Persatuan jika referendum tidak digelar.

Ideologinya cenderung dianggap liberal dari sudut pandang ekonomi, dan mendukung kemerdekaan Catalan. Dari sudut pandang sosial, sebagian besar mendukung moderat dalam berbagai masalah, seperti hak-hak gay, tetapi tidak pernikahan sesama jenis. 2 tahun setelah masa jabatannya yang pertama, Artur Mas menyatakan dalam sebuah pidato di Parlemen bahwa sudah waktunya bagi masyarakat Catalonia untuk menggunakan hak diri sendiri negaranya. Lalu, Desember 2013, Artur Mas, dengan para pemimpin dari lima partai parlemen Catalan, mengumumkan tanggal referendum

penentuan nasib independent Catalan, yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2014 dan beliau memberi pertanyaan:

*"Apakah Anda ingin Catalonia menjadi negara?" dan "Seandainya ada respons yang tegas, apakah Anda ingin Negara ini menjadi independen?"*

Pada bulan April 2014, proposal itu diajukan ke Parlemen Spanyol dan dikalahkan dengan pemungutan suara 299 – 47. Baik sebelum dan sesudah pemungutan suara ini telah menyatakan bahwa referendum akan dilakukan dengan cara hukum, tetapi berdasarkan Konstitusi Spanyol, referendum mengenai kedaulatan harus diadakan secara nasional dan bukan regional, yang mendorong pemerintah Spanyol untuk memveto referendum tersebut.

Dalam hal ini, Arthur Mas bermaksud untuk menghindari penuntutan dengan menurunkannya menjadi suara yang murni simbolis, dan mempekerjakannya dengan sukarelawan. Meskipun dengan upaya ini Pemerintah Pusat Spanyol masih menganggap suara sebagai tidak konstitusional dan dengan ilegal, akhirnya Arthur Mas pergi menentang perintah dari pengadilan konstitusional Spanyol, yang mengarah ke persidangannya. Arthur Mas didakwa oleh jaksa agung dengan memutarbalikkan jalannya keadilan, penyalahgunaan dana publik dan penyalahgunaan kekuasaan, berkaitan dengan peran yang dia asumsikan dalam referendum tidak resmi. Sebuah persidangan dibuka, Arthur Mas dituduh menyalah gunakan kekuasaan dan ketidaktaatan, sebagai akibatnya menghadapi pelarangan memegang jabatan publik hingga 10 tahun dan di denda 36.500 euro. (David, 1994: 60)

Setelah pemerintahan Arthur Mas, Catalonia di pimpin oleh Presiden Carles Puigdemont. Beliau merupakan tokoh politik yang berasal dari etnis Catalan. Dengan bendera pro-kemerdekaan, dia menyatakan,

*"Kami datang dari jauh, tetapi kami tidak lelah. Kami penuh harapan."*

Ketika dua pejabat senior pemerintah Spanyol dari Madrid memandang, Puigdemont bersikap menantang, bersumpah untuk mengkonsolidasikan dukungan di antara para Catalans dan usahanya untuk mendirikan republik yang merdeka.

Pada 1 Oktober 2017, jutaan orang Katalonia memberikan suara dalam referendum, dengan sebagian besar pemilih mendukung kemerdekaan. Pada hari yang sama, kekerasan terjadi ketika pemerintah di Madrid mencoba menghentikan pemungutan suara. Dalam minggu-minggu setelah referendum, Puigdemont mendekat lebih dekat ke tujuannya untuk memperjuangkan tanah airnya dari sebuah gerakan yang dimulai di sebuah kota kecil di provinsi Catalan, Girona. Hampir empat minggu setelah referendum, Katalonia secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan, dengan pemerintah Spanyol di Madrid untuk segera memicu adanya Pasal 155, yang memungkinkan pemerintah nasional untuk mengambil kendali langsung Katalonia.

Pada 30 Oktober Puigdemont dan anggota lain dari pemerintah Catalan dituduh melakukan pemberontakan, penghasutan dan penyalahgunaan dana publik, tuduhan yang membawa hukuman maksimal 30 tahun. Pada hari yang sama, Puigdemont dan lima menteri Catalan lainnya melarikan diri ke Belgia, setelah meninggalkan Katalonia tepat setelah tuduhan itu dilayangkan. Puigdemont mengklaim dia pergi ke ibukota Eropa untuk berbicara dari mengenai posisi kebebasan dan keamanan. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan kembali ke Spanyol kecuali dia dijamin persidangan yang adil.

Pada 7 Desember 2017, sekitar 45.000 pengunjung rasa Catalan turun di Brussels untuk mendukung presiden yang diasingkan. Protes terjadi di luar lembaga Uni Eropa yang bertujuan untuk menekan lembaga-lembaga Uni Eropa untuk mendukung penyebab kawasan itu. Sambil tetap di pengasingan sendiri, Puigdemont memperebutkan pemilihan regional pada 21 Desember dan terpilih kembali ke Parlemen. Dalam pemilihan, kaum separatis Catalan mempertahankan di Parlemen Catalan. Setelah pemilihan, Puigdemont meminta

pembicaraan tanpa syarat baru dengan pemerintah Spanyol dan mengusulkan untuk bertemu Perdana Menteri Spanyol Rajoy di luar Spanyol, tetapi yang terakhir menolak tawaran itu.

Puigdemont adalah kekuatan pendorong di belakang Catalonia mendeklarasikan kemerdekaan. Di tengah kritik dari pemerintah pusat di Madrid untuk perannya dalam referendum, Puigdemont berhasil mendorong pemungutan suara di parlemen Catalan. Pemungutan suara dinyatakan tidak konstitusional oleh pengadilan negara. Namun, Puigdemont dan pendukungnya menantang ketika ia mendorong referendum kedua di kawasan itu untuk kemerdekaan dalam tiga tahun. Dari mereka yang memberikan suara mereka, mayoritas memilih mendukung kemerdekaan, yang mengarah ke krisis politik di Spanyol. Sehari setelah deklarasi, perdana menteri Spanyol membubarkan Parlemen Catalan dan menyerukan pemilihan regional baru pada 21 Desember 2017.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka menarik untuk penulis menganalisis sebab – sebab mengapa munculnya gerakan separatisme di Catalonia karena masyarakat – masyarakat yang ingin melepaskan diri tersebut bukan tanpa alasan yang kuat. Dan rencana kajian ini penulis tuangkan dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Sebab – Sebab Gerakan Separatisme Catalonia Tahun 2014 - 2017”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang diuraikan diatas, maka permasalahan dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan dalam suatu pertanyaan sebagai berikut :

*“Mengapa gerakan separatisme menguat di Catalonia?”*

## **C. Kerangka Teori**

Untuk menjelaskan latar belakang masalah dan kemudian menjawab pokok permasalahan maka dalam kerangka teori ini penulis menggunakan teori / pendekatan yang relevan yaitu Teori Separatisme yang dikemukakan oleh

Horowitz. Menurut Horowitz kelompok atau orang yang ingin memisahkan diri untuk mendapatkan sebuah kedaulatan karena :

1. Merasa tidak puas, merasa berbeda dan sebagainya. Orang-orang ini disebut separatis yang berupaya untuk mendapatkan sebuah kedaulatan sebagai bangsa atau suatu kelompok mereka. Biasanya orang yang berbuat separatis, mereka tidak mau dikatakan separatis karena mereka menganggap istilah tersebut kasar. Mereka lebih menganggap diri mereka disebut dengan determinasi diri (Horowitz, 1981: 5).
2. Penindasan kaum minoritas. Adanya kasta, lalu penindasan kaum yang kuat terhadap kaum yang lemah. Sehingga membuat sekelompok tersebut tidak nyaman berada di lingkungannya.

Gerakan separatis melawan kehendak pemerintah hampir pasti berakhir dalam beberapa bentuk konflik bersenjata dan kekerasan, Horowitz berpendapat,

*“disproportionately attracts people with an interest in aggression. The people willing to take up arms for secession are those who are willing to be brutal with their ethnic enemies and with their own rivals as well. As their advantage grows, new bouts of ethnic cleansing can be expected”* (Horowitz, 1981: 8)

*"tidak proporsional menarik orang yang berkepentingan dengan agresi. Orang-orang yang bersedia mengangkat senjata untuk memisahkan diri adalah mereka yang bersedia menjadi brutal dengan musuh-musuh etnis mereka dan dengan saingan mereka sendiri juga. Ketika keuntungan mereka tumbuh, serangan baru pembersihan etnis dapat diharapkan ”.*

Dalam pandangan Horowitz, mereka yang tampaknya berjuang untuk mendukung gerakan separatis adalah individu

yang lebih agresif dalam masyarakat. Orang - orang ini akan melakukan kejahatan terhadap musuh-musuh etnis mereka, membuat pengakuan hak - hak pemisahan diri menjadi awal pembersihan etnis oleh faksi-faksi ekstremis di kedua belah pihak. Semua teori hak untuk melepaskan diri memahami hak sebagai hak perbaikan saja atau juga mengakui hak primer untuk melepaskan diri. Hak dalam konteks ini berarti hak yang umum, bukan khusus, (yang dihasilkan melalui janji, kontrak, atau hubungan khusus). Horowitz menyatakan bahwa sebuah kelompok memiliki hak umum untuk melepaskan diri dan jika telah mengalami ketidakadilan tertentu, yang mana pemisahan diri merupakan solusi yang tepat dari upaya terakhir. Apa yang disebut hak untuk memisahkan diri berasal dari prinsip penentuan nasib negara itu sendiri. (Horowitz, 1981: 10)

Dalam hal ini, Catalonia mengalami penindasan dalam ekonomi yang sebagian besar pendapatan negaranya dialihkan atau dieksploitasi oleh Spanyol, sehingga Catalonia dianggap negara yang miskin. Tetapi dalam kenyataannya, Catalonia menyumbang ekonomi terbesar untuk Spanyol dibandingkan dengan daerah lainnya. Selain ekonomi, dalam hal politik, politik Catalonia tidak diberikan hak otonomi nya sendiri, sehingga masyarakat merasa tidak puas akan hal tersebut. Partai-partai regional Catalan secara historis kuat dan telah menjadi kekuatan separatistis di Catalonia. Lalu dalam hal kultural, masyarakat Catalonia merasa kecewa, karena identitas bahasa dan budaya mereka yang tidak dianggap dan diakui oleh Spanyol sehingga bangsa Catalan ingin melepaskan diri dan ingin membentuk Negeranya sendiri. Karena represi yang dialami selama rezim Franco, identitas Catalonia yang khas telah terbentuk. Faktor - faktor ekonomi, politik dan kultural disajikan sebagai dasar untuk budaya yang kuat yang ada di Catalonia yang telah meningkatkan sentimen separatistis.

Menurut Buchanan, tidak ada kelompok yang memiliki hak (umum) untuk memisahkan diri kecuali kelompok tersebut menderita dan dianggap sebagai ketidakadilan, tidak memiliki



prospek bantuan yang masuk akal jika tidak ada pemisahan diri. (Buchanan, 1996: 5)

Mengidentifikasi ketidakadilan yang berbeda sebagai menjamin pemulihan pemisahan diri. Ada dua jenis teori dari normatif dari separatisme, yaitu Teori Hak Primer, menegaskan bahwa kelompok-kelompok tertentu dapat memiliki hak (umum) untuk melepaskan diri dalam tidak adanya ketidakadilan. Mereka tidak membatasi pemisahan yang sah menjadi sarana untuk mengatasi ketidakadilan. Berbagai Teori Hak Primer yang berbeda memilih kondisi-kondisi berbeda yang harus dipenuhi oleh kelompok-kelompok untuk memiliki hak untuk melepaskan diri tanpa ketiadaan ketidakadilan. Menurut teori tipe pertama ini, hak (umum) untuk memisahkan diri adalah dalam hal-hal penting yang mirip dengan hak atas revolusi, karena yang terakhir dipahami dalam apa yang dapat disebut arus utama teori-teori normatif revolusi. Yang terakhir ini dilambangkan oleh teori John Locke, yang menurutnya orang memiliki hak untuk menggulingkan pemerintah jika dan hanya hak-hak dasar mereka dilanggar, dan cara-cara yang lebih damai telah sia-sia. (Buchanan, 1996: 14)

Teori-teori Hak Primer tidak dibuat oleh pembuat hukum internasional karena mereka mengesahkan pemotongan negara-negara. Bahkan ketika negara-negara tersebut secara sempurna melakukan apa yang secara umum diakui sebagai fungsi negara yang sah. Dengan demikian, Teori Hak Utama merupakan ancaman langsung dan mendalam terhadap integritas wilayah negara bahkan hanya negara dan memajukan hak yang jauh lebih terbatas untuk memisahkan diri. Mereka kurang menjadi ancaman terhadap integritas teritorial negara-negara yang ada. Oleh karena itu, hal lain dianggap sama, mereka lebih mungkin dimasukkan ke dalam hukum internasional. Pada titik ini mungkin ada keberatan bahwa fakta bahwa negara-negara bagian tidak mungkin memasukkan Teori-teori Hak Primer ke dalam hukum internasional tidak terlalu penting, karena minat mereka untuk menolak perubahan semacam itu sendiri tidaklah sah secara

moral. Tentu saja, negara tidak akan berkeinginan untuk membahayakan keberadaan mereka sendiri. Demikian pula, fakta bahwa kelas penguasa yang berkuasa tidak akan mungkin untuk memberlakukan hukum menghapuskan perbudakan tidak akan menjadi keberatan yang sangat jitu terhadap teori moral yang mengatakan bahwa orang memiliki hak untuk tidak diperbudak. (Buchanan, 1996: 18)

Hak-hak individu, stabilitas harapan individu, dan pada akhirnya keamanan fisik mereka, bergantung pada penegakan aturan hukum yang efektif. Penegakan yang efektif membutuhkan yurisdiksi yang efektif, dan ini pada gilirannya membutuhkan wilayah yang dibatasi dengan jelas yang diakui sebagai domain dari otoritas politik yang teridentifikasi. Bahkan jika otoritas politik benar-benar berbicara hanya dilakukan atas orang, bukan tanah, dan akhirnya pada pembentukan dan pemeliharaan yurisdiksi dalam arti teritorial. Fakta ini terletak pada kebenaran yang jelas tetapi mendalam tentang manusia: Mereka memiliki tubuh yang menempati ruang, dan bahan-bahan untuk hidup di mana mereka bergantung melakukannya juga. Lebih jauh lagi, jika suatu tatanan hukum yang efektif adalah mungkin, baik batas-batas yang menentukan yurisdiksi dan otoritas politik yang diidentifikasi yang yurisdiksinya harus bertahan dari waktu ke waktu. Jadi dengan membuat yurisdiksi yang efektif menjadi mungkin, ketaatan terhadap prinsip integritas teritorial memfasilitasi berfungsinya tatanan hukum dan penciptaan manfaat yang hanya dapat dilakukan oleh suatu tatanan hukum. Kepatuhan dengan prinsip integritas teritorial, kemudian, tidak hanya melayani kepentingan diri negara dalam menjamin kelangsungan hidup mereka sendiri; Hal ini semakin memperjuangkan kepentingan-kepentingan moral yang paling mendasar dari individu-individu dan kelompok-kelompok yang menyatakan diberdayakan untuk melayani, minat mereka dalam pelestarian hak-hak mereka, keamanan orang-orang mereka, dan stabilitas harapan mereka. (Buchanan, 1996: 15)

Dalam terminologi Albert Hirschman, di mana jalan keluarnya terlalu mudah, hanya ada sedikit dorongan untuk menyuarakan kritik yang tulus dan konstruktif dan, lebih umum, untuk partisipasi politik yang jujur. Warga negara dapat keluar dari domain otoritas politik yang ada dengan cara yang berbeda. Untuk mengambil contoh yang berkaitan dengan penyelidikan kita tentang pemisahan diri, maka minoritas dapat lolos dari otoritas hukum yang pemberlakuannya tidak didukung oleh batas-batas politik yang ditarik kembali secara sepihak, itu akan memiliki sedikit insentif untuk tunduk pada kehendak mayoritas, atau untuk beralasan dengan mayoritas untuk mengubah pikirannya. Namun, hukum internasional baru-baru ini memberikan beberapa petunjuk: Negara tidak sah jika mereka mengancam kehidupan sebagian besar penduduknya dengan kebijakan penganiayaan etnis atau agama, atau jika mereka menunjukkan rasisme kelembagaan yang merampas sebagian besar populasi ekonomi dasar dan hak politik. Dalam hal ini, penting untuk menekankan bahwa relevansi hukum internasional yang sebenarnya tergantung pada legitimasi moral dari kepentingan hukum, perubahan dalam hukum berfungsi. Kuncinya adalah bahwa pergeseran dalam hukum internasional jauh dari interpretasi absolut dari prinsip integritas teritorial terhadap interpretasi progresif melayani kepentingan yang sah secara moral dan mencerminkan sikap normatif yang superior. Jadi itu bukan sekadar konformitas terhadap hukum yang ada, tetapi selaras dengan perkembangan progresif secara moral dalam hukum yang berbicara. (Hirschman, 1998: 5)

Sebuah rezim hukum internasional yang membatasi hak untuk memisahkan diri ke kelompok yang menderita ketidakadilan yang serius dan terus-menerus di tangan negara, ketika tidak ada jalan lain yang tersedia bagi mereka. Selain itu, akan memberikan perlindungan dan dukungan kepada negara-negara bagian, dengan tanpa ragu melindungi mereka di bawah payung prinsip integritas teritorial negara yang ada (sah). Oleh karena itu, negara – negara akan memiliki insentif untuk memperbaiki catatan mereka mengenai ketidakadilan

yang relevan untuk memperoleh perlindungan dari pemotongan yang akan mereka nikmati sebagai negara yang sah dan menghormati hak. (Hirschman, 1998: 9)

Perbedaan utama antara hak untuk melepaskan diri dan hak untuk revolusi, adalah bahwa hak untuk melepaskan diri menjadi bagian dari warga negara, terkonsentrasi di sebagian wilayah negara. Tujuan dari pelaksanaan hak untuk melepaskan diri bukan untuk menggulingkan pemerintah, tetapi hanya untuk memutuskan kendali pemerintah atas bagian wilayah itu. Pengakuan hak untuk memisahkan diri dapat dilihat sebagai tambahan teori revolusi Locke dan teori-teori itu. Locke cenderung berfokus pada kasus-kasus di mana pemerintah melakukan ketidakadilan terhadap "rakyat," bukan kelompok tertentu di dalam negara, dan kelihatannya berasumsi bahwa masalah revolusi muncul biasanya hanya ketika ada pola pelanggaran yang terus-menerus yang mempengaruhi sejumlah besar orang. orang di seluruh negara bagian. Gambaran revolusi yang sah ini sangat sederhana yaitu ketika rakyat menderita ketidakadilan yang berkepanjangan dan serius, rakyat akan bangkit. (Locke, 1999: 4)

Menurut Metta Spencer, terjadinya Separatisme dalam konflik politik hanya memperjuangkan kepentingannya sendiri, yang pada akhirnya menciptakan kondisi instabilitas politik. Perpecahan elite politik disertai defisiensi pemerintah menjalankan fungsinya berakibat pada ketidakmampuan pemerintah dalam memberi pelayanan publik akan makin merosot yaitu fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi seluruh masyarakatnya. Hal ini berakibat pada timbulnya rasa ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintahannya. Krisis politik juga dapat disebabkan oleh ketidaksiapan pelaksanaan Otonomi Daerah yang berujung pada timbulnya rasa ketidakadilan. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang kurang tepat mengakibatkan kurang meratanya penyebaran penduduk dan tidak berhasilnya pemberdayaan masyarakat. (Metta, 1998: 86)

Dalam hal ini, negara Catalonia memiliki identitas diri sebagai bangsa dan ras besar inilah yang tampaknya selalu

dieksploitasi oleh para elite Catalonia terhadap publiknya. Dan penyatuan Catalonia menjadi bagian dari Spanyol dipandang sebagai bentuk pendudukan. Walaupun merupakan wilayah di bawah Spanyol, perbedaan sikap politik Catalonia dengan pusatnya (Spanyol) sudah terjadi sejak dulu. Misalnya, pada Perang Dunia I, Spanyol mengambil posisi netral, sedangkan warga Catalan termasuk yang menjadi pasukan pendukung Prancis.

#### **D. Hipotesa**

Berdasarkan rumusan masalah, penulis akan memberikan hipotesa sebagai berikut:

Menguatnya gerakan separatisme Catalonia karena politik dan identitas Catalonia yang tidak dianggap dan diakui oleh Spanyol. Serta adanya eksploitasi ekonomi oleh pusat (Spanyol).

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Menunjukkan gerakan separatisme telah menguat di Catalonia yang mengakibatkan masyarakat mendukung referendum yang disengketakan mengenai kemerdekaan Catalonia.
2. Menunjukkan bahwa terdapat jalan keluar yang dapat diambil dalam menyelesaikan kasus gerakan separatisme di Catalonia.

#### **F. Metode Penelitian**

##### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian analisa dalam penelitian ini adalah menggunakan tipe penelitian eksplanatif, yaitu memberi gambaran yang bersifat penjelasan dan perkembangan mendatang tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab naik turunnya gerakan separatisme di Catalonia yang sebelumnya

telah dianalisa sehingga menjadi relevan untuk disusun sebagai karya ilmiah.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan adalah menggunakan pengumpulan data sekunder, yaitu penulis tidak menjalankan observasi langsung di lapangan, namun berdasarkan pada data yang telah tersedia, dengan melakukan telaah pustaka pada sejumlah literatur, yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diteliti yaitu antara lain :

- a. Buku – buku,
- b. Jurnal dan dokumen,
- c. Majalah dan surat kabar,
- d. Artikel-artikel dan data dari internet (*website*).

## G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan bab-bab berikutnya, penulis akan membagi pembahasan kedalam beberapa bab, dengan perincian sebagai berikut :

BAB I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, sejarah mengenai Spanyol dan Catalonia

BAB III, penjelasan mengenai menguatnya gerakan separatisme dan pandangan dunia internasional.

BAB IV, analisa alasan menguatnya gerakan separatisme oleh Catalonia

BAB V, berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.